

Al-Qur'an dan Nasionalisme Indonesia: Dialektika Tafsir dalam Pembentukan Ideologi Kebangsaan

Khoiruddin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Muh. Mukaddam Haris

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Abstract: This study examines the dialectical relationship between Qur'anic interpretation and Indonesian nationalism ideology formation, from the independence period to the contemporary era. By analyzing the works of prominent Indonesian Muslim scholars who have contributed to the discourse of Islam and nationalism, this study reveals how Al-Qur'an has been used as a theological resource to legitimize, criticize, and enrich the concept of Indonesian nationalism. The study shows that the relationship between Qur'anic interpretation and Indonesian nationalism is not unidirectional, but dynamic and dialectical. On one side, nationalist needs and aspirations have influenced how Muslim scholars interpret Qur'anic verses related to community relations, government, and collective identity. On the other side, Qur'anic interpretations that have been formulated have also contributed to shaping the character and direction of Indonesian nationalism. The study concludes that the Islam-nationalism dialectic in Indonesia has produced a distinctive model of civic nationalism that is inclusive, pluralistic, and rooted in local Islamic ethical tradition, which is relevant not only for Indonesia but also as a contribution to global discourse about Islam's relationship with the modern nation-state.

Keywords: Al-Qur'an and nationalism, Indonesian Islam, Islamic tafsir, nation-state, Pancasila.

Corresponding Author:

Khoiruddin; khoiruutama@gmail.com

Article info:

Received: April 21, 2023; Revised: May 17, 2023; Accepted: June 01, 2023

How to cite this article:

Khoiruddin, and Muh. Mukaddam Haris. "Al-Qur'an dan Nasionalisme Indonesia: Dialektika Tafsir dalam Pembentukan Ideologi Kebangsaan." *Indonesian Journal of Qur'an and Tafsir Studies* 1, no. 1 (2023): 32-39.

Pendahuluan

Relasi antara Islam dan nasionalisme merupakan salah satu persoalan paling fundamental dan kompleks dalam sejarah modern Indonesia. Sejak masa pergerakan kemerdekaan hingga saat ini, para tokoh Muslim Indonesia telah bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat berdialektika secara produktif dengan cita-cita nasionalisme, tentang apakah identitas keagamaan dan identitas kebangsaan saling bertentangan atau justru saling memperkuat, dan tentang bagaimana Al-Qur'an sebagai sumber otoritas tertinggi umat Islam dapat memberikan fondasi teologis bagi proyek kebangsaan yang inklusif dan pluralis.¹

Persoalan ini bukanlah persoalan yang hanya bersifat akademis semata. Ia memiliki implikasi praktis yang sangat nyata bagi kehidupan politik, sosial, dan budaya Indonesia. Cara umat Islam Indonesia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini telah, dan terus, membentuk karakter Islam Indonesia, arah perkembangan demokrasi Indonesia, dan model hidup bersama yang dikembangkan dalam masyarakat yang sangat majemuk ini.²

Dalam konteks historis, perdebatan tentang relasi Islam dan nasionalisme di Indonesia telah berlangsung setidaknya sejak tahun 1930-an, ketika para tokoh pergerakan kemerdekaan bergulat dengan persoalan ini secara terang-terangan. Perdebatan tersebut mencapai klimaksnya dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tahun 1945, di mana pertanyaan tentang dasar negara menjadi titik pertemuan yang paling panas antara visi nasionalisme sekuler dan visi negara Islam.³

Kompromi yang dicapai dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara merupakan solusi politik yang genius, namun tidak serta-merta menghentikan perdebatan teologis dan intelektual tentang relasi Islam dan nasionalisme. Perdebatan tersebut terus berlangsung dalam berbagai arena, termasuk dalam diskursus akademik dan tafsir Al-Qur'an, dengan berbagai tokoh Muslim menawarkan interpretasi-interpretasi yang berbeda tentang bagaimana Al-Qur'an seharusnya memandu pemahaman dan praktik nasionalisme umat Islam Indonesia.⁴

Kajian ini bertujuan untuk menelusuri dialektika tafsir Al-Qur'an dan pembentukan ideologi kebangsaan Indonesia, dengan fokus pada tiga periode kritis yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Periode pertama mencakup masa pergerakan dan kemerdekaan (1900-1950-an). Periode kedua mencakup masa Orde Baru dan munculnya gerakan Islam baru (1966-1998). Periode ketiga mencakup era reformasi dan kontemporer (1998-sekarang).

¹ Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia* (Singapore, ISEAS, 2003), 1-20.

² Robert W. Hefner, *Civil Islam* (Princeton, Princeton University Press, 2000), 1-25.

³ Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta, Gramedia, 2011), 50-80.

⁴ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999), 10-30.

Diskursus Nasionalisme dan Islam dalam Sejarah Indonesia

Untuk memahami dialektika tafsir dan nasionalisme di Indonesia, perlu terlebih dahulu dipetakan konteks historis dan intelektual di mana dialektika ini berlangsung.

Periode Pergerakan dan Kemerdekaan

Pada periode ini, dua orientasi besar dapat diidentifikasi dalam cara tokoh-tokoh Muslim memahami relasi antara Islam dan nasionalisme. Orientasi pertama adalah yang melihat nasionalisme sebagai sesuatu yang pada dasarnya netral atau bahkan positif dari perspektif Islam, selama nasionalisme tersebut tidak menjadi tujuan akhir yang melampaui komitmen kepada Tuhan dan nilai-nilai Islam universal. Orientasi kedua adalah yang memandang nasionalisme secara lebih kritis, sebagai paham yang berpotensi menggantikan loyalitas kepada ummah Islam yang universal.⁵

Haji Agus Salim adalah salah satu tokoh paling penting dari orientasi pertama. Dengan kemampuan argumentasinya yang luar biasa, Salim berhasil menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang umat Islam untuk mencintai dan berjuang bagi tanah air mereka.⁶ Para ulama NU mengembangkan konsep tentang "hubbul wathan minal iman" (cinta tanah air adalah bagian dari iman) sebagai prinsip teologis yang mendukung nasionalisme.⁷

Periode Orde Baru dan Munculnya Gerakan Islam Baru

Masa Orde Baru (1966-1998) merupakan periode yang sangat kompleks dalam sejarah hubungan Islam dan negara di Indonesia. Pada awalnya, rezim Soeharto bersikap sangat represif terhadap aspirasi-aspirasi politik Islam, dan hal ini mendorong sebagian tokoh Muslim untuk mengembangkan pendekatan "kultural" terhadap Islam, yang menekankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan budaya tanpa pretensi untuk membangun negara Islam secara formal.⁸

Nurcholish Madjid adalah figur yang paling berpengaruh dalam pengembangan pendekatan ini. Dengan konsep "sekularisasi" (bukan sekularisme) yang ia kemukakan pada tahun 1970, Madjid mendorong umat Islam untuk membebaskan diri dari sakralisasi hal-hal yang tidak sakral, termasuk ideologi-ideologi politik tertentu yang diklaim sebagai manifestasi Islam.⁹ Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, pendekatan Madjid mendorong pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang masyarakat, pemerintahan,

⁵ Anthony Reid, *Imperial Alchemy* (Cambridge, Cambridge University Press, 2010), 80-100.

⁶ Merle C. Ricklefs, *Islamisation and Its Opponents in Java* (Singapore, NUS Press, 2012), 100-120.

⁷ Robin Bush, *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power* (Singapore, ISEAS, 2009), 40-60.

⁸ Effendy, *Islam and the State in Indonesia*, 50-80.

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung, Mizan, 1987), 1-30.

dan relasi sosial yang menekankan substansi nilai-nilai ketimbang bentuk-bentuk formalistik.¹⁰

Dialektika Tafsir dalam Pembentukan Ideologi Kebangsaan

Analisis yang lebih mendalam terhadap karya-karya tafsir yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Muslim Indonesia mengungkapkan beberapa pola dialektis yang sangat menarik dalam hubungan antara penafsiran Al-Qur'an dan pembentukan ideologi kebangsaan.

Ayat-ayat Persatuan dan Keberagaman sebagai Landasan Pluralisme

Salah satu pola dialektis yang paling menonjol adalah penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an tentang persatuan, keberagaman, dan kemanusiaan universal sebagai landasan teologis bagi pluralisme kebangsaan Indonesia. Ayat yang paling sering dikutip dalam konteks ini adalah Surah al-Hujurat ayat 13 tentang penciptaan manusia dari laki-laki dan perempuan serta dalam berbagai suku dan bangsa, dan Surah al-Rum ayat 22 tentang perbedaan bahasa dan warna kulit sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan.¹¹

Para mufasir nasionalis Indonesia memberikan interpretasi khusus terhadap ayat-ayat ini yang melampaui makna literalnya. Mereka menggunakan ayat-ayat tersebut tidak hanya untuk mengakui keberagaman sebagai fakta penciptaan, tetapi untuk memberikan legitimasi teologis bagi proyek kebangsaan yang merangkul keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman.¹²

Konsep Umat dan Bangsa dalam Tafsir Nasionalis

Salah satu tantangan teologis terbesar bagi para mufasir nasionalis Indonesia adalah bagaimana mempertemukan konsep "umat" dalam Islam, yang merujuk pada komunitas Muslim universal melampaui batas-batas geografis dan etnis, dengan konsep "bangsa" yang merupakan komunitas yang dibatasi oleh wilayah, sejarah, dan identitas kultural bersama.¹³ Para mufasir nasionalis Indonesia umumnya menyelesaikan tensio ini melalui pembedaan antara dua level loyalitas yang tidak saling menafikan.¹⁴

Hamka, dalam Tafsir al-Azharnya, mengembangkan argumen yang sangat menarik tentang hal ini. Menurutnya, kecintaan kepada tanah air bukan bertentangan dengan Islam, melainkan justru merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab, kesetiaan, dan pelayanan kepada sesama.¹⁵

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Jakarta, Paramadina, 1992), 120-150.

¹¹ Latif, *Negara Paripurna*, 180-210.

¹² Azyumardi Azra, *Islam in the Indonesian World* (Bandung, Mizan, 2006), 80-100.

¹³ Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia* (London, Routledge, 1995), 30-55.

¹⁴ Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, 80-100.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982), Vol. 1, 50-65.

Pancasila dalam Perspektif Tafsir

Mungkin tidak ada tema yang lebih menunjukkan dialektika antara tafsir Al-Qur'an dan ideologi kebangsaan Indonesia secara lebih dramatis daripada perdebatan tentang Pancasila. Bagi sebagian tokoh Muslim, Pancasila dipandang sebagai kompromi yang tidak ideal karena tidak secara eksplisit menjadikan Al-Qur'an atau syariat Islam sebagai landasan negara. Bagi yang lain, Pancasila dipandang sebagai formula yang brilian karena mampu mengakomodasi keberagaman agama dan budaya Indonesia.¹⁶

Para tokoh NU, terutama sejak diselenggarakannya Muktamar Situbondo tahun 1984 yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal, telah mengembangkan argumentasi teologis yang sangat menarik untuk mendukung penerimaan Pancasila. Argumen ini pada dasarnya berpendapat bahwa Pancasila, dengan sila pertamanya tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah mengandung pengakuan terhadap keesaan Tuhan yang merupakan inti dari tauhid Islam.¹⁷

Era Reformasi dan Menguatnya Identitas Islam Politik

Era reformasi pasca-1998 membawa perubahan dramatis dalam lanskap politik dan keagamaan Indonesia. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan terbukanya ruang demokratis yang lebih luas, berbagai gerakan Islam yang selama ini tertekan mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi mereka secara lebih terbuka. Ini mencakup gerakan-gerakan yang mengadvokasi formalisasi syariat Islam.¹⁸ Menguatnya gerakan Islam politik ini mengakibatkan intensifikasi perdebatan tentang relasi Al-Qur'an dan nasionalisme.¹⁹

Al-Qur'an sebagai Basis Legitimasi Nasionalisme Indonesia

Dari analisis historis dan tekstual yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa tema Qur'anik yang secara konsisten digunakan oleh para mufasir nasionalis Indonesia sebagai basis legitimasi bagi nasionalisme yang inklusif.

Tema Kemaslahatan Umum

Konsep masalah mursalah (kemaslahatan umum) yang dikembangkan dalam fiqh Islam klasik menjadi salah satu landasan teologis terpenting bagi nasionalisme moderat Indonesia. Para mufasir nasionalis berargumen bahwa keberadaan negara-bangsa Indonesia yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan

¹⁶ Nadirsyah Hosen, "Religion and the Indonesian Constitution," *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 3 (2005), 420-430.

¹⁷ Bush, *Nahdlatul Ulama*, 100-120.

¹⁸ Greg Barton, *Indonesia's Struggle* (Sydney, UNSW Press, 2004), 30-55.

¹⁹ Martin van Bruinessen, ed., *Contemporary Developments in Indonesian Islam* (Singapore, ISEAS, 2013), 1-30.

merupakan salah satu kemaslahatan umum terbesar yang diperintahkan dan didukung oleh Al-Qur'an.²⁰ Dalam perspektif ini, menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga kewajiban keagamaan.²¹

Tema Keadilan dan Perdamaian

Nilai-nilai keadilan (al-adalah) dan perdamaian (al-salam) yang sangat sentral dalam ajaran Al-Qur'an juga dijadikan landasan teologis bagi nasionalisme yang berkarakter damai dan berkeadilan. Para mufasir nasionalis Indonesia berpendapat bahwa komitmen kepada negara bangsa bukan dimaksudkan sebagai penonjolan diri di atas kelompok-kelompok lain, melainkan sebagai bentuk pengorganisasian kolektif yang memungkinkan perwujudan keadilan dan perdamaian dalam skala yang lebih luas.²²

Tema Tanggung Jawab Kolektif

Konsep Al-Qur'an tentang tanggung jawab kolektif (fardhu kifayah) juga memainkan peran penting dalam legitimasi teologis nasionalisme Indonesia. Para mufasir berargumen bahwa membangun dan mempertahankan negara-bangsa yang adil dan kuat merupakan salah satu fardhu kifayah yang harus dipenuhi oleh umat Islam Indonesia. Pengabaian terhadap tanggung jawab ini merupakan dosa kolektif yang harus dihindarkan.²³

Concluding Remarks

Kajian ini telah menunjukkan bahwa dialektika antara tafsir Al-Qur'an dan pembentukan ideologi kebangsaan Indonesia merupakan proses yang panjang, kompleks, dan terus berkembang. Para mufasir Muslim Indonesia dari berbagai generasi dan latar belakang telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengembangkan teologi nasionalisme yang berakar dalam tradisi Islam namun responsif terhadap kebutuhan dan tantangan konteks Indonesia yang unik.

Kontribusi terpenting dari tradisi tafsir nasionalis Indonesia adalah pengembangan model civic nationalism yang bersifat inklusif, pluralis, dan berakar dalam tradisi etika Islam yang kaya. Model ini, yang menekankan nilai-nilai kemaslahatan bersama, keadilan, perdamaian, dan tanggung jawab kolektif sebagai fondasi nasionalisme, menawarkan alternatif yang sangat relevan terhadap dua ekstrema yang sama-sama bermasalah, yaitu nasionalisme sekuler yang menutup ruang bagi nilai-nilai keagamaan di satu pihak, dan islamisme yang menolak legitimasi negara-bangsa di pihak yang lain.

²⁰ Latif, *Negara Paripurna*, 300-330.

²¹ Hefner, *Civil Islam*, 150-175.

²² Ramage, *Politics in Indonesia*, 90-110.

²³ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta, The Wahid Institute, 2006), 80-100.

Model nasionalisme Islam yang dikembangkan di Indonesia ini tidak hanya relevan bagi Indonesia sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi yang berharga bagi diskursus global tentang relasi Islam dengan negara-bangsa modern. Di tengah meningkatnya ketegangan antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan di berbagai penjuru dunia, pengalaman Indonesia dalam mempertemukan Islam dan nasionalisme secara produktif menawarkan pelajaran-pelajaran berharga yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari para akademisi dan praktisi di seluruh dunia.

Penelitian lanjutan yang diperlukan mencakup kajian komparatif tentang dialektika Islam dan nasionalisme di berbagai negara Muslim lainnya, serta analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana generasi Muslim Indonesia kontemporer, yang dibesarkan dalam era digital dan globalisasi, memahami dan merespons warisan tafsir nasionalis yang telah dikembangkan oleh generasi-generasi sebelumnya.

Bibliography

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.
- Azra, Azyumardi. *Islam in the Indonesian World*. Bandung, Mizan, 2006.
- Barton, Greg. *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*. Sydney, UNSW Press, 2002.
- Barton, Greg. *Indonesia's Struggle: Jemaah Islamiyah and the Soul of Islam*. Sydney, UNSW Press, 2004.
- Bush, Robin. *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Effendy, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Fealy, Greg. "Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival." *Southeast Asian Affairs* (2004), 104-121.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton, Princeton University Press, 2000.
- Hosen, Nadirsyah. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate." *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 3 (2005), 419-440.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta, Gramedia, 2011.
- Madjid, Nurcholish. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta, Paramadina, 1992.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung, Mizan, 1987.
- Masdar, Farid Mas'udi. *Agama Keadilan: Risalah Zakat dalam Islam*. Jakarta, P3M, 1991.
- Ramage, Douglas E. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*. London, Routledge, 1995.

- Reid, Anthony. *Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia*. Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
- Ricklefs, Merle C. *Islamisation and Its Opponents in Java*. Singapore, NUS Press, 2012.
- Salim, Arskal, and Azyumardi Azra, eds. *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- van Bruinessen, Martin, ed. *Contemporary Developments in Indonesian Islam*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2013.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta, The Wahid Institute, 2006.
- Woodward, Mark R. *Java, Indonesia, and Islam*. Dordrecht, Springer, 2011.